

IMPLIKASI MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Afnibar¹

Abstract

It is known how poor the counselor education employees performance. Counselor getting negative label by head master, by other teachers, and also by students which them underhonourable. They called as counselor police, with unknown job description: like catching trouble maker students, collecting absent form, etc. This paper purpose the solution through implementing the guidance and counseling management, in order to increase school counselor performance.

Key word: *School counselor, performance, guidance and counseling management*

A. Pendahuluan

Salah satu komponen pendidikan di lembaga pendidikan adalah bidang bimbingan konseling, di samping bidang administrasi dan pengajaran. Ketiga komponen ini memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mencapai tujuan tingkat satuan pendidikan. BK pada dasarnya memiliki visi, terwujudnya perkembangan kemandirian individu secara optimal sesuai dengan hakekat kemanusiaannya sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat meraih kehidupan yang berbahagia.

Kehidupan yang berbahagia ditandai oleh keefektifan hidup sehari-hari (KES) dan ketidakbahagiaan seseorang ditandai oleh ketidakefektifan hidup sehari-hari (KES-T). Selanjutnya misi profesi konseling di sekolah adalah menunjang pengembangan diri peserta didik secara optimal dan memandirikan peserta didik untuk dapat menyelenggarakan kehidupan sehari-hari secara efektif, melalui pelayanan konseling agar peserta didik memiliki kompetensi dalam: a) beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, b) Pemahaman diri dan lingkungan, c) Pengambilan keputusan, d) Pengarahan diri, e) Antisipasi dan

¹ Dosen Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang
70 *Jurnal Ilmiah dan Profesi Dakwah*

pemenuhan tuntutan masa depan, f) Pengaktualisasian diri secara optimal (Depdiknas 2004: 14)

Konseling merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku (SK Mendikbud No. 025/D/1995). Tujuan penyelenggaraan BK di sekolah tercapai atau tidak, sangat ditentukan oleh kinerja konselor sekolah karena konselor sekolah (guru pembimbing) adalah personil yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh melaksanakan bimbingan konseling di sekolah (Depdikbud, 1995: 21). Namun, kenyataan hari ini konselor sekolah belum menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari adanya kritikan-kritikan terhadap konselor sekolah, seperti dikemukakan M. Surya (1988: 146), kebanyakan konselor sekolah di sekolah hanya sedikit melakukan konseling dan lebih banyak melakukan penegakan disiplin, tugas mengajar, dan memimpin kelompok kerja. Senada dengan itu A. Muri Yusuf (1995: 16-17) mengemukakan pelayanan BK belum memberi nilai tambah karena petugas BK belum mampu menunjukkan kegiatan yang bermakna sesuai dengan kebutuhan siswa dan keadaan lingkungan sekolah. Bahkan ada kritikan yang lebih ekstrim dengan adanya julukan yang tidak benar yang diberikan kepada guru pembimbing, antara lain sebagai "GP: Guru Piket", "BP: Boleh Pulang" atau polisi sekolah (Lilyarufda, 1998: 1).

Kritikan tersebut diduga karena pelaksanaan BK di lembaga pendidikan belum ditata dengan baik, dalam artian manajemen BK belum terlaksana sebagaimana mestinya. Lembaga pendidikan, dapat dibagi atas tiga, yakni lembaga pendidikan in formal, formal, dan non formal. Lembaga pendidikan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal dapat dilihat dari tingkatan, yakni dari TK hingga Perguruan Tinggi dan dari aspek jenis ada lembaga pendidikan umum dan kejuruan. Sehubungan dengan itu makalah sederhana ini membahas lebih lanjut tentang implikasi manajemen BK di lembaga pendidikan, dengan pokok-pokok pembahasan:

1. Kinerja Konselor di lembaga Pendidikan
2. Selintas tentang Manajemen BK
3. Pentingnya Manajemen dalam pelayanan BK di lembaga pendidikan

B. Pembahasan

1. Kinerja Konselor di Lembaga Pendidikan

Kinerja (*performance*) adalah kemauan dan kemampuan melakukan suatu pekerjaan. Drucker (1997: 95) menyatakan kinerja merupakan apa yang bisa dikerjakan seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sesuatu yang dapat dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Berdasarkan berbagai versi pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan, kinerja adalah kemampuan melakukan pekerjaan yang dapat dilihat dari prestasi yang ditampilkan.

Kinerja konselor sekolah di sekolah terkait dengan tugas pokoknya. Tugas pokok konselor sekolah berkenaan dengan pelayanan BK menurut Erickson yang dikutip Mortensen dan Schumuller (1964: 8), adalah *individual inventory, the counseling, the information services, the placement services, and the follow up services*. Berdasarkan pendapat di atas kegiatan pelayanan BK mencakup: pengumpulan data, konseling, pemberian informasi, penempatan dan tindak lanjut. Senada dengan itu Bernard dan Fullmer (1977: 8) menambahkan *research and consultatin*, yang berarti pemahaman dan konsultasi. Selanjutnya Gibson dan Mitchell (1987: 67) mengemukakan tugas guru pembimbing adalah: 1) *assessment of the individual's and other characteristics*; 2) *counseling the individual*; 3) *group counseling and guidance activities*; 4) *career guidance, including the providing of occupational educational information*; 5) *placement, follow up, and accountability evaluation: and*; 6) *consultation with teachers and other school personnel, parents, pupils, in group and appropriate community agencies*. Tugas guru pembimbing adalah mengenal siswa dengan berbagai karakteristiknya, konseling perorangan, bimbingan dan konseling kelompok, melaksanakan bimbingan karir termasuk informasi pendidikan dan karir, penempatan, tindak lanjut dan penilaian, konsultasi dengan guru, semua personil sekolah, orang tua, siswa, kelompok dan masyarakat.

Dari beberapa pendapat di atas, terlihat betapa banyak kegiatan yang dapat dilakukan guru pembimbing di lembaga pendidikan, yaitu pengumpulan data siswa, memberikan layanan informasi, konseling perorangan, konseling kelompok, bimbingan karir, layanan penempatan, konsultasi dengan personil sekolah lainnya, dan tindak lanjut.

Pada awal perkembangan BK di Indonesia, sampai diterbitkannya SK Menpan No. 84 Tahun 1993. Kegiatan pelayanan BK belum terpola, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi tentang BK di sekolah. Sehubungan dengan itu Prayitno, dkk (1995) mengemukakan pelayanan BK di sekolah sebagai salah satu kesatuan, dinamakan 'BK Pola 17' yang terdiri dari (1) empat bidang bimbingan, yaitu bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan

belajar, dan bimbingan karir, (2) tujuh jenis layanan, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, dan konseling kelompok, (3) lima kegiatan pendukung yaitu; aplikasi instrumentasi BK, penyelenggaraan himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus, (4) satu wawasan dan pengetahuan yang mantap yang mencakup; pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, landasan, dan asas BK. Sekarang BK 17 berkembang dan dikenal dengan istilah BK 17 Plus, di mana ada penambahan pada bidang pelayanan BK, yaitu bidang pengembangan kehidupan berkeluarga dan pengembangan kehidupan keberagamaan, serta penambahan pada jenis layanan BK, yaitu layanan konsultasi dan mediasi (Prayitno, 2004: ii).

Selanjutnya gagasan tersebut, diakui secara nasional dan dicantumkan dalam ketentuan resmi penyelenggaraan BK di lembaga pendidikan di Indonesia, yakni dalam SK Mendikbud No. 25 Tahun 1995 tentang petunjuk teknis ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya (1995: 21). Tugas pokok guru pembimbing di sekolah, (1) Menyusun program bimbingan, yaitu rencana pelayanan BK dalam bidang bimbingan pribadi, belajar, bimbingan sosial, dan bimbingan karir, (2) melaksanakan program bimbingan, yaitu melaksanakan fungsi pelayanan pemahaman, pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan (pada BK 17 plus ditambah dengan fungsi advokasi) dalam setiap bidang pelayanan, (3) Evaluasi pelaksanaan BK, (4) analisis hasil evaluasi, dan (5) tindak lanjut.

2. Manajemen BK

Manajemen secara umum berarti seni mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugas (Follet dalam Amin Budiman, 2003: 261). Selanjutnya Stonner (1996: 7) mengemukakan manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang ditetapkan.

Istilah “seni” menyangkut kemampuan pribadi atau keterampilan yang dimiliki, dalam hal ini mengatur orang untuk menjalankan tugas. Senada dengan itu Kast & Rosenzweig (1979: 7) mengemukakan bahwa “...*management is a process of planning, organizing and controlling activities*”. Secara lebih lengkap Terry (1975: 4) menyatakan “*management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources*”

Berdasarkan pengertian manajemen menurut Kast & Rozenzweig serta Terry, manajemen sebagai “proses”, istilah ini lebih mengacu kepada “cara sistimatis”. Dalam manajemen proses dapat berarti bahwa manajemen memerlukan: (1) konsep dasar pengetahuan, (2) kemampuan menganalisis situasi, kondisi, sumber daya yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk mencapai tujuan, (3) adanya pendekatan yang mengikuti tahap-tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, dengan seni tertentu karena menyangkut pelibatan orang-orang. Dari pemahaman konsep manajemen yang merujuk kepada pendapat di atas, bahwa dengan istilah proses pada dasarnya telah tercakup di dalamnya istilah “seni”. Dengan demikian manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tahap-tahap kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan segala sumber daya.

Istilah manajemen sudah dapat dipahami, selanjutnya pengertian manajemen BK. Thantawy R (1993: 56) manajemen adalah teknik atau metode mendayagunakan secara optimal, efisien, dan efektif semua komponen atau sumber daya, yaitu tenaga, dana, serta sarana dan prasarana, dan sistem informasi bimbingan untuk melaksanakan fungsi bimbingan dan konseling untuk mencapai tujuan. Merujuk kepada pengertian manajemen dan pendapat Thantawy, maka manajemen BK dapat juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan BK, dengan memanfaatkan semua komponen sumber daya yang ada.

3. Pentingnya Manajemen dalam Pelayanan BK di lembaga Pendidikan

Semua personil di lembaga pendidikan, idealnya terlibat dalam kegiatan BK, baik sebagai pelaksana, pendukung (berpartisipasi), dan pengawas, maupun sebagai sasaran layanan. Pelaksana dalam manajemen BK dan pelayanan BK adalah koordinator BK dan Konselor Sekolah. Pengecualian, apabila kepala sekolah dan wakil, awalnya adalah konselor sekolah mereka juga pelaksana BK, yakni dengan siswa asuh 40 orang dan 75 orang.

Koordinator BK, merupakan manejer dalam pelayanan BK di sekolah dengan anggotanya konselor sekolah. Tugas manejer menurut T Hani Handoko (1997: 41) adalah:

a. Manejer bekerja dengan dan bersama orang lain, dalam hal ini koordinator BK bekerja dengan bawahannya (konselor sekolah) dan dengan atasannya (kepala sekola, dengan sejawat (guru-guru mata pelajaran), dan dengan orang lain di luar sekolah.

- b. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan, serta menetapkan prioritas. Koordinator BK sebagai pemimpin dalam organisasi yang memiliki berbagai kepentingan, adakalanya dihadapkan dengan berbagai kepentingan yang berbeda dan mendesak. Pada saat itu koordinator BK diharapkan dapat mengambil keputusan yang baik dan bijaksana.
- c. Manejer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, artinya koordinator BK bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugasnya sendiri dan terhadap kegiatan yang dilakukan konselor sekolah, dan sekaligus mempertanggungjawabkannya.
- d. Manejer harus berpikir secara analitis dan konseptual, maksudnya koordinator BK perlu senantiasa memikirkan kemajuan dan upaya meningkatkan kinerja konselor sekolah dalam pelaksanaan layanan BK, yang menuntut pemikiran yang analitis, konseptual, jitu, dan komprehensif dari koordinator BK
- e. Manejer adalah seorang mediator, koordinator BK bekerja dengan banyak pihak, antar pihak yang terlibat dapat saja terjadi permasalahan atau kesalahpahaman, maka ia dapat bertindak sebagai mediator.
- f. Manejer adalah seorang politisi, koordinator BK dalam menjalankan tugasnya dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan dapat mengkomunikasikannya kepada konselor sekolah, guru, dan kepala sekolah.
- g. Manejer adalah seorang diplomat, peran koordinator BK dalam hal ini dapat mewakili kepala sekolah dalam berbagai kesempatan resmi atau tidak resmi dalam kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak. Diharapkan dengan terlibatnya koordinator BK sebagai diplomat akan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan sekolah.
- h. Manejer sebagai pengambil keputusan yang sulit, koordinator BK dalam menjalankan perannya kadangkala dihadapkan dengan berbagai persoalan yang pelik dan rumit untuk itu ia harus mampu mengambil keputusan yang tepat.

Tugas-tugas sebagai manejer di atas, tentunya tidak sederhana, agar koordinator sukses menjalankannya maka ia diharapkan memiliki (1) keterampilan konseptual, yakni keterampilan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang rumit, (2) keterampilan administratif, yakni dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengawasan, (3) keterampilan kemanusiaan, yakni keterampilan untuk memahami manusia, memahami sikap, motif, berkomunikasi secara jelas dan efektif, serta terbuka, dan (4) keterampilan teknis, yakni menerapkan pengetahuan dan keahliannya.

Selanjutnya terkait dengan koordinator BK sebagai manajer, maka koordinator BK juga bertugas mengkoordinir konselor sekolah dalam:

Implementasi Manajemen BK di Lembaga Pendidikan

- a. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan kepada segenap warga sekolah, orang tua siswa dan masyarakat
- b. Menyusun program bimbingan.
- c. Melaksanakan program bimbingan.
- d. Mengadministrasikan pelayanan bimbingan
- e. Menilai program
- f. Memberikan tindak lanjut terhadap hasil penilaian bimbingan (Depdikbud, 1997).

Berkenaan dengan tugas koordinator BK di atas, Prayitno (2002: 27-28), menambahkan, 1) mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya tenaga, prasarana dan sarana, alat dan perlengkapan pelayanan BK, 2) Mempertanggungjawabkan pelaksana pelayanan BK kepada kepala sekolah, 3) berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepengawasan oleh pengawas sekolah bidang BK.

Seiring dengan tugas koordinator BK di atas, terutama dalam mengkoordinir konselor sekolah (dalam: pelaksanaan tugas pokoknya, penyediaan sarana-prasarana, mempertanggungjawabkan pelaksanaan layanan BK di sekolah), Kinerja konselor sekolah terkait dengan pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu (1) Menyusun program bimbingan, (2) melaksanakan program bimbingan, (3) Evaluasi pelaksanaan BK, (4) analisis hasil evaluasi, dan (5) tindak lanjut.

Berdasarkan tugas pokok konselor sekolah, pada dasarnya proses manajemen dapat direalisasikan:

- a. Perencanaan (istilah "penyusunan program") tercakup di dalamnya penetapan tujuan, penentuan kebijakan, strategi, program, prosedur, anggaran, metode, dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Menurut Prayitno (1997: 8-9) program BK adalah satuan rencana keseluruhan kegiatan BK yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu, seperti bulanan, semesteran, dan tahunan).
- b. Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, pengembangan kelompok kerja yang mengarah pada pencapaian tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu, dan pendelegasian wewenang yang diperlukan. Dalam pelaksanaan BK, misalnya: berkenaan dengan pembagian lokal/anak asuh untuk masing-masing konselor sekolah
- c. Penggerakan, dalam tugas pokok konselor sekolah terkait dengan pelaksanaan program. Konselor sekolah melaksanakan program harian, bulanan, semesteran dan tahunan, terhadap semua siswa asuh dan sesuai dengan kebutuhan.
- d. Pengawasan, terkait dengan upaya agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang telah digariskan.

Afnibar

Pengawasan pada tingkat mikro dapat dilakukan koordinator BK dan Kepala sekolah, dan secara makro dilakukan oleh pengawas sekolah bidang BK.

Melalui aktifitas yang menerapkan manajemen BK, diharapkan pelayanan BK di sekolah lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan program BK merupakan hal pokok bagi para pengelola dan pelaksana pelayanan BK, terutama bagi tercapainya perkembangan peserta didik yang optimal.

C. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pelaksanaan tugas pokok koordinator BK dan konselor sekolah pada dasarnya terkait dengan proses manajemen.
2. Manajemen BK di sekolah merupakan tanggung jawab koordinator BK dan konselor sekolah.
3. Penerapan manajemen BK dalam pelaksanaan program bulanan, semesteran dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kinerja konselor sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Budiman (2003) *Manajemen Bimbingan Karir Pada SMU Negeri di Kabupaten Bandung*. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Vol. 2 No. 4. Bandung: ABKIN
- A Muri Yusuf (1995). *Program Pengembangan Profesionalitas petugas Bimbingan di Sekolah*. Disertasi. PPS IKIP Bandung.
- Bernard, H.W. & Fullmer, D.W. (1977) *Principles of Guidance*, London: Harper & Low Publisher.
- Depdiknas (2002), *Panduan Umum Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Depdikbud, (1996) *Kurikulum Sekolah Menengah Umum tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Bimbingan dan Konseling* Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Depdikbud (1995), *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25/o/1995*. Tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jakarta: Depdikbud
- Depdiknas (2002), *Panduan Pelayanan BK Berbasis Kompetensi: SMU/ Kejuruan, MA, dan Sederajat*.
- Depdiknas (2004). *Dasar Standarisasi Profesi Konseling*. Jakarta: Depdiknas
- Drucker P.F. (1997) *The Effective Executive*. Terjemahan. Jakarta PT Alex Media Komputindo Gramedia
- Gibson, R.L. & Mitchell, M.H. (1987) *Introduction to Guidance*. New York: Macmillan Publisher
- Kast & Rosenzweig (1979) *Organization & Management*. Tokyo International Student Edition, Mc Graw Hill Books Kagakusha
- Lilyarufda. (1998) *Analisis Penilaian Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling*, Makalah. Pada seminar Profesionalisasi BK di Jambi,

Implementasi Manajemen BK di Lembaga Pendidikan

- M. Dachnel Kamars (1994). *Kurikulum untuk Abad 21 dalam Model Pengelolaan dan Penelitian Kurikulum*. Jakarta: Gramedia.
- M. Surya. (1988) Dasar-Dasar *Penyuluhan Konseling*. Jakarta: Depdikbud
- Mortensen, D.G & Schumuler, A.M. (1964) *Guidance in To Day's School*. New York.
- Prayitno, dkk (1997). *Seri Pemandu Pelaksanaan BK di Sekolah*. Buku III: Pelayanan BK di SMU. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi.
- Prayitno.(2004) *Seri Layanan Konseling: Layanan Mediasi*. Jurusan BK-FIP UNP Padang.
- T. Hani Handoko (1997) *Manajemen* (edisi 2) Yogyakarta: Andi Offset
- Thantawy R (1993) *Kamus Bimbingan Konseling*. Jakarta: Economics Student Group.

Tentang Penulis:

Dra. Afniar, M.Pd Kons, lahir di Barus Tapanuli Tengah tanggal 26 Maret 1963. Menyelesaikan SD di Saruaso Tahun 1976. MTsN Batusangkar Tahun 1979. SPG Padang Panjang Tahun 1982, Sarjana (S1) jurusan BK FIP IKIP Padang Tahun 1986, Program Pascasarjana (S2) UNP Jurusan BK Tahun 2000, Pendidikan Profesi BK Tahun 2005 UNP, dan sekarang mahasiswa Program Doktor angkatan ke III Prodi Ilmu Pendidikan UNP. Sejak Tahun 1992 sampai sekarang menjadi dosen tetap di Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang.